

Analisis Semiotika Sosial M.A.K Halliday Pemberitaan Kontroversi Kafir di Media Online Kompas.com dan Republika.co.id

Ismandianto¹, Isnaini²

^{1,2} Universitas Riau

Email: ismandianto@lecturer.unri.ac.id

Abstract: *The decision of the Alim Ulama National Conference and the Nahdhatul Ulama Grand Conference which prohibited mentioning non-muslims as infidels has sparked controversy, which led to criticism and contra responses from various parties. Several online media that reported on the controversy over the prohibition of mentioning kafir for non-muslims were Kompas.com and Republika.co.id. The research aims to look at the discourse field, discourse actors and discourse facilities in the reporting of both online media. The results show that in the discussion of the infidels controversy in Kompas.com and Republika.co.id there is more emphasis on the background and the pros and cons of the public. Informants who are appointed as citations in accordance with their fields. The language in this report shows that Kompas.com agrees while Republika.co.id agrees and disagrees.*

Keywords: *Kafir; news; online media; social semiotics*

Abstrak: Keputusan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdhatul Ulama yang melarang menyebut kafir pada non-muslim telah memantik kontroversi sehingga menimbulkan kritikan dan tanggapan kontra dari berbagai pihak. Beberapa media *online* yang memberitakan kontroversi pelarangan penyebutan kafir bagi non-muslim adalah Kompas.com dan Republika.co.id. Penelitian ini bertujuan untuk melihat medan wacana, pelibat wacana dan sarana wacana dalam pemberitaan kedua media *online*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembahasan tentang kontroversi kafir di Kompas.com dan Republika.co.id adalah lebih menekankan latar belakang serta tanggapan pro dan kontra dari publik. Narasumber yang diangkat sebagai kutipan sesuai dengan bidangnya. Bahasa pada pemberitaan ini menunjukkan bahwa Kompas.com bersikap setuju sedangkan Republika.co.id bersikap setuju dan tidak setuju.

Kata kunci: Kafir; pemberitaan; media *online*; semiotika sosial

Pendahuluan

Indonesia termasuk salah satu negara demokrasi di dunia. Mayoritas penduduk pemeluk agama Islam selanjutnya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menjamin kebebasan bagi masyarakat termasuk kebebasan beragama. Dasar negara Indonesia yang menetapkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa berhubungan dengan prinsip pertama Pancasila. Hal ini juga tertuang dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk menciptakan negara multikultur serta bertoleransi. Dalam pasal 29 dinyatakan bahwa negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara telah memberi jaminan kemerdekaan pada tiap-tiap penduduknya agar bisa memeluk agama dan beribadat secara bebas.

Setiap agama memiliki istilah untuk menyebut orang di luar agamanya. Istilah tersebut berbeda beda sesuai dengan ajaran masing-masing agama, yaitu: menurut ajaran Hindu, orang yang berada di luar agama Hindu atau non-Hindu disebut maitrah. Dalam ajaran Buddha, orang yang berada di luar agama Buddha atau non-Budhis disebut abrahmacariyavasa. Menurut ajaran Kristen, orang yang berada di luar agama Kristen atau non-Kristiani disebut domba yang tersesat. Dalam ajaran Yahudi orang yang berada di luar agama yahudi atau non-Yahudi disebut ghoyim dan dalam ajaran Islam, orang yang berada di luar agama islam atau non-Muslim disebut kafir.

Dalam Islam, kafir mempunyai banyak pengertian. Menurut Cawidu (1991) dalam konsep *kufir* dalam Alquran dikupas dari segi bahasa, kafir mengandung arti menutupi. Malam disebut kafir karena ia menutupi siang atau menutupi benda-benda dengan kegelapannya. Awan juga disebut kafir karena ia menutupi matahari (Gusman, 2013). Sidang Komisi Bahsul Masail Ad-Diniyyah Al-Maudhuiyyah pada Musyawarah Nasional Alim Ulama NU 2019 membahas status non-muslim di Indonesia. Persidangan tersebut mencoba mendudukan status non-muslim dalam konteks berbangsa dan bernegara dengan merujuk pada literatur klasik keislaman. Akhir persidangan itu telah menyimpulkan bahwa non-Muslim di Indonesia tidak memenuhi kriteria kafir sebagaimana disebutkan dalam Fiqih Siyasah. Non-muslim di Indonesia tidak perlu dipaksakan untuk dipadankan dengan kata kafir karena keduanya memiliki kedudukan berbeda (K, 2019).

Keputusan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdhatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Banjar Jawa itu menjadi polemik perdebatan antara para cendekiawan muslim. Pro-kontra hasil keputusan munas yang dilaksanakan pada 01 Maret 2019 lalu dianggap bahwa ulama terkontaminasi virus liberalisme (kebebasan) sehingga mengademenkan Alquran, terlalu memihak kepada kaum kafir yang secara jelas musuh Islam yang nyata. Serta argumen-argumen miring tentang keputusan konferensi tersebut (Kompasiana.com).

Pada minggu 03 Maret 2019, seorang Sejarawan Islam Dr. Tiar Anwar Bachtiar menjelaskan tentang makna kafir sebagai bentuk tanggapan dari polemik pelarangan penyebutan kafir dari hasil munas NU. Sejarawan Islam tersebut menjelaskan Alquran menggunakan kata kafir secara objektif. Alquran bahkan tidak memiliki tendensi hinaan ataupun kekerasan. Kata kafir hanyalah istilah teologis, untuk membedakan orang yang menerima hidayah Allah (muslim) dan yang menutup diri dari hidayah Allah (kafir). Bertentangan dengan penjelasan NU yang menjelaskan bahwa seorang muslim seharusnya tidak menggunakan panggilan yang sensitif kepada non-muslim, seperti "*hai kafir*". Sebaliknya Tiar Anwar memperjelas bahwa kata atau istilah kafir sama sekali tidak digunakan sebagai bahasa keseharian bahkan sebagai kata sapaan (Pratama & Andi Nur, 2019).

Berita mengenai pelarangan penyebutan kafir bagi non muslim menjadi isu yang krusial dan kontroversial diberbagai media masa, *online*, cetak, maupun elektronik, hingga menjadi perbincangan di media Malaysia. Dilansir dari Republika.co.id setelah menjadi perdebatan hangat di dindonesia, polemik kontroversi kafir menjadi bahan pemberitaan di Malaysia. Salah satu lembaga pers Malaysia Kini, turut mengulas hasil rekomendasi Bahtsul Masail NU tersebut. Dalam sebuah artikel, Malaysia Kini menyebut bahwa keputusan NU telah menggemparkan wacana umat Islam tidak hanya di Indonesia. Berjudul Polemik Istilah Kafir

Dibahas Media Malaysia, artikel Malaysia Kini membenarkan bila wacana yang dimunculkan NU telah menjadi perbincangan yang cukup menarik bagi warga Malaysia, kemudian dipaparkan tentang pemaknaan istilah kafir di dalam Alquran.

Berbagai media *online* dan elektronik beramai-ramai memberitakan pelarangan penyebutan kafir bagi non-muslim berdasarkan hasil munas Nahdhatul Ulama. Beberapa berita dimuat dengan judul yang berbeda namun dengan isi berita yang sama, yaitu: Rekomendasi Munas Ulama NU: Jangan Sebut Kafir pada Nonmuslim dalam detiknews.com pada Jumat, 01 Maret 2019. NU Larang Penyebutan Kafir bagi Nonmuslim dalam PortalBekasi.com pada Senin, 04 Maret 2019. NU akan Sosialisasikan Penghapusan Sebutan Kafir untuk Nonmuslim dalam TEMPO.CO pada Minggu, 3 Maret 2019. Viral Istilah Nonmuslim dan Kafir di Munas NU, Ini Penjelasan KH. Affudin Muhajir dalam Youtube pada Minggu 03 Maret 2019. NU Mau Hapus Istilah Kafir untuk Nonmuslim, Warganet: Ngaco pada portal berita Suara.com pada Jumat, 01 Maret 2019. Eskalasi pemberitaan semakin naik seiring dengan banyaknya tanggapan dari publik. NU Usul NonMuslim di Indonesia Tak Disebut Kafir dalam Kompas.com pada Jumat 01 Maret 2019.

Dalam hal pemberitaan, beberapa media mempunyai persepsi dan makna yang berbeda dalam menghadapi isu-sisu yang beredar. Perbedaan tersebut terletak pada bagian penulisan berita, cara media menyimpulkan makna dari sebuah isu, termasuk menentukan *angel*. Sifat negatif yang dimiliki oleh suatu berita, maka akan menjadi tantangan bagi sebuah media untuk menyajikan informasi yang tetap aktual, faktual serta berimbang. Karena pemilihan kata dalam penulisan berita dapat mengonstruksikan seorang tokoh dipandang baik atau buruk. Untuk itulah, berita mempunyai arti keterangan kejadian atau peristiwa hangat dan sedang terjadi serta harus diketahui oleh khalayak publik (Nasrullah, 2016).

Berita kontroversi pelarangan penyebutan kafir dimuat oleh media massa. Media massa terbagi menjadi dua kategori yaitu media cetak dan media elektronik (Ardianto & Komala, 2004). Namun saat ini media massa tidak hanya didominasi oleh media cetak maupun elektronik, tetapi juga media *online*. Media *online* merupakan media yang dapat tersaji secara *online* atau di situs web yaitu internet (Romli, 2012). Media *online* memberikan kemudahan mencari informasi seputar apapun termasuk berita. Informasi yang disampaikan media *online* sangat luas dan aktual. Khalayak dapat membaca di manapun dan kapanpun tanpa harus dibatasi oleh waktu.

Beberapa media *online* yang berkelanjutan memberitakan kontroversi kafir adalah Kompas.com dan Republika.co.id. Berdasarkan penelitian Istikhana Nurulhuda mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunankalijaga Yogyakarta dalam skripsinya mendefinisikan Kompas.com sebagai media yang berideologikan nasionalis dalam memberitakan sebuah berita. Dalam penelitian ini juga dikatakan bahwa Kompas.com sebagai media yang berbasis nasional menilai bahwa permasalahan agama dan pemerintahan harus dipisahkan. Berita mengenai pelarangan penyebutan kafir dimuat sebanyak 5 (lima) berita pada Kompas.com, jumlah ini masih terhitung banyak jika dibandingkan dengan detik.com yang hanya memuat 4 (empat) berita saja.

Berbeda dengan Republika.co.id yang mempunyai standar tertentu dalam pemberitaannya. Berdasarkan penelitian dari Nurulhuda (2016) mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam penelitiannya mengatakan bahwa Republika.co.id

berideologikan Islam. Ideologi mempengaruhi pemberitaan. Dalam hal ini akan berbeda Republika.co.id dalam memberitakan kontroversi kafir bagi non-muslim Indonesia.

Berdasarkan data Alexa pada September 2018, Kompas.com menempati posisi ke 7 dari 50 *topsite* di Indonesia dan posisi ke 121 *topsite* global pada 2020 dan Republika.co.id menempati urutan ke 112 *topsite* Indonesia dan menduduki posisi 1.706 *topsite* Global. (<https://www.alexa.com/topsites>).

Berdasarkan data dari alexa.com di atas, Kompas.com dan Republika.co.id termasuk salah satu media berkapabilitas secara nasional dan internasional dalam pemberitaannya sehingga dapat dipercayai informasi yang dikonsumsi oleh khalayak publik. Untuk itu, peneliti ingin mengetahui mengapa dan bagaimana Kompas.com dan Republika.co.id mewacanakan teks dan memaknai kata kafir dilihat dari pemberitaannya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari et al. (2018) dengan judul Analisis Semiotika Sosial Pemberitaan Kasus Korupsi e-KTP di situs Liputan6.com. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif dengan analisis semiotika sosial M.A.K Halliday untuk mengetahui medan wacana, pelibat wacana dan sarana wacana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga konteks yang berbeda, yaitu wacana sebagai domain, wacana subjek, serta alat wacana. Dalam wacana domain dibuat kata-kata bahwa Nazaruddin mengungkapkan ada aliran dana proyek kartu e-ID ke beberapa parpol yang ada di DPR.

Penelitian tentang kafir pernah dilakukan oleh (Sa'adah, 2018) dengan judul Kafir Dalam Al-Qur'an: Studi Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al- Mishbah dan Relevansinya dengan Toleransi di Indonesia dalam penelitian ini dijelaskan bahwa terminologi kafir merupakan isu yang sensitif dalam wacana keislaman terutama ketika dibenturkan dengan kepentingan politik. Kafir secara umum diartikan dengan orang yang beragama selain Islam yang terkomplikasi pada keyakinan bahwa mereka adalah orang yang sesat, masuk neraka dan tidak bisa dijadikan sebagai pemimpin. M. Quraish Shihab sebagai mufassir Indonesia kontemporer memiliki pandangan yang khas tentang kafir. M. Quraish Shihab memandang kepada pemahaman yang toleran dan menjunjung tinggi perdamaian.

Oleh karena itu, berangkat dari penelitian sejenis terdahulu di atas serta data-data aktual yang ada peneliti bermaksud mengetahui bagaimana Kompas.com dan Republika.co.id mewacanakan teks pada berita pelarangan penyebutan kafir bagi non-muslim dan bagaimana Kompas.com dan Republika.co.id memaknai kafir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 3 (tiga) komponen analisis semiotika sosial yaitu medan wacana, pelibat wacana, dan sarana wacana pada pemberitaan kontroversi kafir di Kompas.com dan Repulikka.co.id.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif oleh Bogdan dan Taylor dalam Lafexy J. Moleong memberikan definisi tentang penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian penghasil data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati.

Untuk membedah setiap berita pada masing-masing media *online*, penelitian ini menggunakan analisis semiotika sosial model M.A.K Halliday. Halliday membuat suatu kerangka kerja yang memberikan muatan interaksi antara teks dan situasi (konteks). Kemudian

didasarkan pada tiga konsep yaitu medan wacana (*field of discourse*), pelibat wacana (*tenor of discourse*) dan mode wacana (*mode of discourse*) (Sudibyo, 2001).

Paradigma yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma konstruktivis. Paradigma ini sering juga disebut sebagai paradigma produksi dan pertukaran makna (Eriyanto, 2002). Asumsi dari paradigma ini adalah sebuah realitas bersifat subjektif tidak objektif. Karena realitas tercipta lewat konstruksi dan pandangan tertentu.

Sumber data dari penelitian berasal dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari analisis data berdasarkan teori serta riset, data sekunder di peroleh dari wawancara. Analisis data adalah sebuah kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengategorikan data sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus dan masalah yang ingin di pecah.

Hasil dan Pembahasan

Penulis menggunakan teori semiotika sosial milik M.A.K Halliday dengan konsep bahasanya yaitu, bahasa adalah semiotika sosial yang berarti menafsirkan bahasa dalam konteks sosiokultural. Hasil penelitian terhadap teks berita kedua media dengan beberapa judul berita pada tanggal 1 hingga 7 Maret 2019. Temuan data berdasarkan analisis semiotika sosial M.A.K Halliday, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Temuan Data/ Rekap Data Berita di Kompas.com

Temuan/ Judul	Medan Wacana (<i>Field of Discourse</i>)	Pelibat Wacana (<i>Tenor of Discourse</i>)	Sarana Wacana (<i>Mode of Discourse</i>)
NU Usul Non-Muslim di Indonesia Tak Disebut Kafir	Dalam berita non-muslim wacananya adalah dijadikan Kompas.com, yaitu dan ulama lainnya yang menggelar musyawarah nasional lalu dari hasil munas itu difatwakan dan NU mengusulkan untuk tidak menyebut non-muslim Indonesia dengan panggilan kafir.	Said Aqil Siraj, KH Abdul Moqsith Ghazali, Mutasyar PBNU Prof Muhammad Machasin, Rais Syuriyah, KH Masdar Farid Masdudi dan KH Subhan Ma'mun, Katib KH Abdul Ghofur Maimun, Katib A'am Syuriyah PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, Zubair dan H Asrorum Niam Sholeh, Sekretaris Jendral PBNU H Helmi Faishal Zianl, Ketua PGI, PHID.	Dari sarana wacana yaitu gaya bahasa yang digunakan antara lain yaitu: majas eufisme, majas aptronim.
Ini Kata PGI soal Keputusan NU Tak Sebut Umat Non-Muslim Kafir	Dalam berita kontroversi kafir bagi non-muslim dilihat dari medan wacana yaitu yang dijadikan wacana oleh kompas.com adalah	Ketua PGI Pendeta Hendriette Hutabarat-Lebang, Sekretaris Umum PGI Pendeta Ghomar Gultom.	Dari medan wacana tampak gaya bahasa yang ada di dalam berita kontroversi kafir bagi non-muslim

Temuan/ Judul	Medan Wacana (<i>Field of Discourse</i>)	Pelibat Wacana (<i>Tenor of Discourse</i>)	Sarana Wacana (<i>Mode of Discourse</i>)
	Persatuan Gereja Kristen Indonesia (PGI) yang menyambut positif rekomendasi munas alim ulama dan konbes Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yakni tidak menggunakan kata kafir bagi umat non-muslim di Indonesia. Yang mengatakan, istilah kafir terhadap seseorang atau kelompok non-muslim dapat mengganggu persaudaraan masyarakat sebangsa dan setanah air.		Indonesia adalah: majas kontradiksi, majas apofasis, majas eufisme
5 Fakta Munas NU di Banjar, Tolak Sebutan Kafir untuk Non-Muslim	Dalam berita ini yang dijadikan wacana oleh kompas.com adalah Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Nahdlatul Ulama (NU) yang mengusulkan warga non-muslim tidak disebut kafir di mana acara tersebut dihadiri oleh Jokowi. Kemudian dijelaskan ada lima fakta munas yang dihadiri Jokowi tersebut.	Presiden Joko Widodo, Ibu negara Afghanistan, Rula Ghani, istri Presiden Ashraf Ghani, Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Moqsih Ghazali, Mustasyar PBNU Muhammad Machasin, Rais Am Syuriah PBNU KH Miftahul Akhyar, Maimun Zubair, dan H Asrorun Niam Sholeh, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Ketua PBNU H Marsudi Syuhud, Sekretaris Jenderal PBNU H Helmi Faishal Zaini.	Majas eufisme, majas apironim, majas tautologi
PHDI Hormati Keputusan NU Soal Pembatasan Sebutan Kafir	Yang dijadikan wacana oleh Kompas.com, yaitu Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) menyambut baik hasil kajian hukum atau Bahtsul Masail Maudluiyyah pada	Adapun pelibat wacana adalah: Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat, I Nyoman Sutantra, Ketua PBNU Said Aqil Siraj,	Adapun gaya bahasa (sarana wacana) dalam berita kontroversi kafir bagi non muslim yaitu: majas apofasis,

Temuan/ Judul	Medan Wacana (<i>Field of Discourse</i>)	Pelibat Wacana (<i>Tenor of Discourse</i>)	Sarana Wacana (<i>Mode of Discourse</i>)
	Musyawarah Nasional (munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar PBNU tentang pembatasan penggunaan sebutan kafir bagi umat non-muslim.		majas elipsis, majas eufisme.
PDI-P Apresiasi Hasil Munas NU tentang Kesetaraan	Adapun yang dijadikan wacana oleh kompas.com adalah di mana Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya mengapresiasi hasil Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo Kota Banjar.	Adapun pelibat wacana adalah Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto, Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Abdul Moqsith Ghazali.	Dalam berita kontroversi kafir bagi non-muslim Indonesia pada judul ini adapun gaya bahasa yang digunakan adalah : majas eufisme, majas aptronym, majas

Sumber: hasil olahan peneliti, 2020

Hasil analisis dari semua berita yang telah peneliti lakukan, maka ditemukan bahwa kelima berita di atas termasuk dalam jenis *straight news* dan memiliki nilai berita (*news value*) yang tinggi untuk jadikan sebuah berita. *Immediacy* peristiwa ini cukup mendapat perhatian publik diawal tahun 2019. Sehingga waktu di sini sangat penting. *Prominence*, peristiwa yang terkait dengan tokoh terkenal disebut juga *names make new*". Nilai berita ini akan menarik pembaca karena akan dilihat siapa (*who*) untuk diangkat dalam berita. *Emotion*, unsur ini menyangkut kejadian yang mengandung kemarahan, kesedihan, empati, simpati, cinta, kebencian, kebahagiaan atau humor. *Progress*, peristiwa yang menyangkut perkembangan dari suatu berita. Sehingga masyarakat menunggu nunggu kelanjutan berita tersebut.

Dalam berita-beritanya Kompas.com lebih memuat isu pemberitaan tersebut pada tanggapan tokoh-tokoh publik atau organisasi tertentu atas adanya keputusan rekomendasi pelarangan penyebutan kafir bagi non-muslim oleh NU. Kompas.com ingin menekankan bahwa kontroversi pelarangan penyebutan kafir itu patut diapresiasi dan ditanggapi positif karena menyatukan masyarakat dalam satu bangsa dan negara tanpa adanya pembeda-beda dengan kedudukan sebagai warga negara. Kutipan berita yang diangkat oleh Kompas.com

sebagai narasumber langsung tertuju kepada tokoh-tokoh besar yang berkompeten memperlihatkan nilai berita yang aktual dan berbobot dihadapan publik.

Tabel 2. Temuan Data/ Rekap Data Berita di Republika.co.id

Temuan/ Judul	Medan Wacana (<i>Field of Discourse</i>)	Pelibat (<i>Tenor of Discourse</i>)	Wacana	Sarana Wacana (<i>Mode of Discourse</i>)
NU Rekomendasikan Hindari Istilah Kafir untuk Non-Muslim	Dalam berita kontroversi kafir bagi non muslim, dilihat dari medan wacana, yaitu yang dijadikan wacana oleh republika.co.id adalah Ketua Umum PBNU Said Aqil menyampaikan hasil kajian masalah dari musyawarah nasional di mana keputusan itu menyangkut kepentingan bangsa dan negara, yang disampaikan Said Aqil adalah salah satunya adalah tentang istilah kafir yang tidak di kenal dalam kewarganegaraan, jadi tidak ada istilah kafir bagi non-muslim.	Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj, Nabi Muhammad SAW.	Umum Besar Ulama	Dalam berita kontroversi kafir bagi non muslim pada judul ini gaya bahasa yang digunakan adalah: majas elipsis, majas eufisme, majas apofasis
Ini Kata MUI Soal Larangan Mengucap Kafir pada Non-Muslim	Dalam berita kontroversi kafir bagi non muslim indonesia pada judul berita kedua, dilihat dari medan wacana yaitu yang dijadikan wacana oleh republika.co.id yaitu: Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), menanggapi hasil Munas Alim Ulama dan PBNU tentang pelarangan pengucapan kafir bagi non muslim. Huzaimah berpendapat bahwa beda konteks kafir dan kewarganegaraan.	Ketua Bidang Fatwa Majelis Indonesia Huzaimah Yanggo.	Fatwa Ulama (MUI), Tohido	Gaya bahasa atau sarana wacana pada berita kontroversi kafir bagi non muslim indonesia pada judul dua yaitu: majas kontradiktif
Kafir yang Menuai Kontroversi	Yang diwacanakan oleh republika.co.id, yaitu kontroversi kafir yang muncul terhadap hasil munas PBNU dan para alim ulama dinilai wajar, karena kata kafir sudah ada sejak lama dalam	Adapun pelibat wacana yaitu yang dilibatkan atau di kutip oleh republika.co.id adalah PBNU		Aadapun yang menjadi sarana wacana adalah gaya bahasa yang digunakan oleh republika.co.id

Temuan/ Judul	Medan Wacana (<i>Field of Discourse</i>)	Pelibat Wacana (<i>Tenor of Discourse</i>)	Sarana Wacana (<i>Mode of Discourse</i>)
	Alquran, sedangkan banyak pihak yang merekomendasikan untuk tidak menggunakannya dalam menyebut non-muslim Indonesia.		yaitu: majas eufisme
Ini Argumentasi NU Mengenai Kata Kafir Harus Dihindari	Adapun medan wacana yaitu yang dijadikan wacana oleh republika.co.id adalah: menjelaskan tentang isi argument NU mengenai kata kafir yang harus dihindari, dengan mengatakan Pancasila sebagai dasar negara berhasil menyatukan rakyat Indonesia yang plural, baik dari sudut etnis dan suku maupun agama dan budaya.	Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Moqsith Ghazali.	Gaya bahasa yang digunakan oleh republika.co.id yaitu: majas apofasis, majas kontradiksi
Polemik Istilah Kafir Dibahas Media di Malaysia	Yang diwacanakan oleh republika.co.id yaitu: kontroversi pergantian istilah kafir ke non-muslim berdasarkan hasil munas alim ulama dan PBNU menjadi polemik dan perdebatan hangat di Indonesia. Oleh sebab itu hal itu juga menjadi pemberitaan di media Malaysia bahkan wacana yang dimunculkan NU tersebut telah menjadi perbincangan yang cukup menarik bagi warga Malaysia.	Adapun yang dilibatkan oleh republika.co.id pada judul ini adalah: Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi.	Gaya bahasa atau sarana wacana yang digunakan dalam berita ini adalah majas eufisme, majas aptronym, majas apofasis.
Latar Belakang PBNU Memutuskan tak Gunakan Istilah Kafir	Dilihat dari medan wacana pada pemberitaan kontroversi kafir bagi non-muslim Indonesia di judul 5, yang diwacanakan oleh republika.co.id adalah NU yang memutuskan dan merekomendasikan untuk tidak menggunakan istilah kafir bagi non-muslim Indonesia mempunyai latar belakang tertentu. Di mana NU mengatakan salah satu latar	Dilihat dari yang dilibatkan atau yang dikutip oleh republika.co.id adalah: Wakil Sekjen PBNU, Masduki Baidlowi, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail PBNU KH	Gaya bahasa atau sarana wacana yang digunakan adalah majas elipsis, majas kontradiksi

Temuan/ Judul	Medan Wacana (<i>Field of Discourse</i>)	Pelibat (<i>Tenor of Discourse</i>)	Wacana	Sarana Wacana (<i>Mode of Discourse</i>)
	belakang nya adalah mengedepankan kembali semangat keputusan Mukttamar NU 1984.	Abdul Ghazali.	Moqsith	
Din Syamsuddin: Rancu Bila Istilah 'Kafir' Diganti 'Warga'	Dari medan wacana, yaitu apa yang diwacanakan oleh republika.co.id adalah: Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Din Syamsuddin yang mengatakan ada kerancuan dalam rekomendasi pergantian istilah kafir ke non-muslim jika tidak dijelaskan secara benar dan detail.	Adapun pelibat wacana yaitu yang dilibatkan oleh republika.co.id adalah: Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Din Syamsuddin.		Dilihat dari sarana wacana yaitu gaya bahasa yang digunakan oleh republika.co.id dalam berita tersebut adalah: majas eufisme, majas aptronym, majas tautologi
Kafir dan Iman tidak Bisa Diamandemen	Medan wacana yaitu yang diwacanakan oleh republika.co.id adalah; Fahri Hamzah sebagai mantan wakil ketua DPR yang mengatakan bahwa kata kafir yang ada di dalam Alquran tidak bisa diamandemen karena tidak ada kata kafir dalam konstitusi dan undang-undang.	Adapun pelibat wacana yaitu yang dikutip oleh republika.co.id adalah: Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI		Adapun sarana wacana yaitu gaya bahasa yang digunakan oleh republika.co.id adalah: majas kontradiksi, majas eufisme
Apa dan Siapa Kafir Itu?	Dalam pemberitaan kontroversi kafir bagi non muslim indonesia pada judul 7 dilihat dari medan wacana nya yaitu apa yang sedang diwacanakan oleh republika.co.id adalah: Syahrudin El-Fikri yang ikut berkomentar mengenai viral nya pergantian istilah kafir dan kontroversi nya yang diperdebatkan oleh publik dan para tokoh politik.	Syahrudin Elfikri		Sarana wacanayaitu gaya bahasa yang digunakan oleh republika.co.id adalah: majas eufisme, majas aptronym, majas apofasis.
Soal Penghapusan Sebutan Kafir, Ini Respons Walubi	Dilihat dari medan wacana yaitu dilihat dari apa yang di wacanakan oleh Republika.co.id adalah: Ketua Dewan Kerukunan	Dan dilihat dari pelibat wacana, yaitu yang dilibatkan oleh republika.co.id dalam judul berita		Dilihat dari sarana wacana yaitu gaya bahasa yang digunakan oleh

Temuan/ Judul	Medan Wacana (<i>Field of Discourse</i>)	Pelibat (<i>Tenor of Discourse</i>)	Wacana	Sarana Wacana (<i>Mode of Discourse</i>)
	Agama Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) yang menanggapi positif, keputusan Nahdlatul Ulama (NU) soal penghapusan sebutan kafir bagi warga negara Indonesia yang beragama non-muslim, dimana Walubi atau umat Buddha tidak pernah mempermasalahkan sebutan kafir tersebut.	tersebut	adalah: Ketua Dewan Kerukunan Agama Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Suhadi Sendjaja, Ketua Umum PBNU Kiai Said Aqil Siradj.	republika.co.id adalah: majas aptronim.
Mari Hargai Keputusan NU dan Hentikan Polemik Istilah Kafir	Dilihat dari Medan Wacana, yang sedang diwacanakan oleh Republika.co.id . Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi pun meminta umat Islam tak berlebihan dalam menanggapi hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar PBNU meskipun Keputusan PBNU yang tidak menggunakan istilah kafir bagi WNI non-muslim menuai pro dan kontra di masyarakat.	Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi, Ketua Umum Pengurus Besar Al Washliyah, KH Yusnar Yusuf, Presiden RI Joko Widodo dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj, Sekretaris Umum PGI, Pendeta Gomar Gultom, Ketua Dewan Kerukunan Agama Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Suhadi Sendjaja, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin).	Sarana wacana atau gaya bahasa yang digunakan oleh republika.co.id adalah majas kontradiksi, majas elipsis.	
Said Aqil Jelaskan Perbedaan Kafir dan Non-Muslim	Yang diwacanakan oleh republika.co.id adalah dengan adanya keputusan Munas NU untuk tidak menggunakan kata kafir dalam menyebut non muslim, karena itu timbul kontroversi. Karena itu ketuma umum PBNU menjelaskan perbedaan kafir dan non-muslim yang	Yang dilibatkan oleh repulika.co,id adalah: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj, Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail PBNU KH	Adapun gaya bahasa yang digunakan adalah: majas kontardiksi, majas apofasis.	

Temuan/ Judul	Medan Wacana (<i>Field of Discourse</i>)	Pelibat (<i>Tenor of Discourse</i>)	Wacana	Sarana Wacana (<i>Mode of Discourse</i>)
	merujuk pada zaman Rasulullah SAW dulu.	Abdul Ghazali,		Moqsith

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2020

Dalam berita-beritanya Republika.co.id lebih memuat isu pada latar belakang kontroversi kafir hingga berbagai tanggapan dari publik. Dari narasumber yang diangkat, Republika.co.id ingin menekankan bahwa kontroversi kafir perlu dilihat dari berbagai sudut pandang, terlebih dari latar belakang sejarahnya. Sehingga dapat disimpulkan apakah rekomendasi pelarangan penyebutan kafir bagi non-muslim merupakan keputusan yang tepat atau tidak. Peristiwa ini agar memiliki kualitas berita yang baik, haruslah ditentukan dengan narasumber yang dikutip. Pernyataan dan kutipan dari narasumber yang berkompeten dapat terlihat berbobot atau tidaknya berita tersebut.

Simpulan

Berdasarkan analisis dari penelitian tentang kontroversi kafir di situs Kompas.com dan Republika.co.id, maka peneliti dapat menarik simpulan, yaitu memaknai isi teks yang di produksi oleh dua media yaitu Kompas.com dan Republika.co.id dalam berita mengenai kontroversi kafir bagi non-muslim. Pemberitaan dari Kompas.com yang menjelaskan bagaimana sisi positif kata kafir tersebut dihilangkan menunjukkan dukungan kepada keputusan munas. Berbeda dengan Republika.co.id, makna yang di produksi cenderung netral bahwa keputusan munas merekomendasikan tak sebut kafir bagi non-muslim Indonesia tergantung bagaimana publik menilai. Republika.co.id memberitakan dari dua sisi yaitu pro dan kontra. Dalam hal ini dijelaskan bagaimana yang pro dan yang kontra. Rekomendasi tak sebut kafir bagi non-muslim bermakna bisa saja direalisasikan dan bisa saja tidak karena jika mengacu pada Islam yaitu Alquran, maka akan didapati makna bahwa penghilangan kata kafir tidak diperbolehkan karena hal itu sudah menjadi ketentuan baku dalam Alquran. Namun jika mengacu pada status kewarganegaraan bisa saja diterima karena berkaitan dengan persatuan umat, meskipun juga ada bantahan bahwa antara warga negara dan kafir tidak berkaitan.

Referensi

- Alexa. *The top 500 sites on the web*. From <https://www.alexa.com/topsites>
- Ardianto, E., & Komala, L. (2004). *Komunikasi massa: suatu pengantar*. Simbiosis Rekatama Media.
- Cawidu, H. (1991). *Konsep Kufur dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Gusmian, I. (2013). *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Yogyakarta: LKiS.
- K, A. (2019). *Ini Penjelasan atas Kontroversi Tiada Orang Kafir di Indonesia*. <https://www.nu.or.id/post/read/103208/ini-penjelasan-atas-kontroversi-tiada-orang-kafir-di-indonesia>

- Kompasiana.com. (2019). *Problematika Penyebutan Non-Muslim dan Kafir di Indonesia*. <https://www.kompasiana.com/mujahidilanshari/5c7f99aebde5756add589413/problematika-penyebutan-non-muslim-dan-kafir-di-indonesia?page=all>
- Nasrullah, R. (2016). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nurulhuda, I. (2016). *Konstruksi Berita Pemblokiran Situs Islam di Media Online (Analisis Framing di Republika Online dan Kompas.com)* [Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta]. http://digilib.uin-suka.ac.id/22997/2/11210093_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
- Pratama, M. R. W., & Andi Nur, A. (2019). *Sejarawan Islam Ini Jelaskan Istilah Kafir*. <https://republika.co.id/share/pnsfv9384>
- Romli, A. S. M. (2012). *Jurnalistik Online, Panduan Praktis Mengelola Media Online, Kiat Blogger, Teknik SEO, Citizen Journalism*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Sa'adah, N. L. (2018). *KAFIR DALAM AL-QUR'AN (Studi Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir AlMishbah dan Relevansinya dengan Toleransi di Indonesia)*. [UIN Walisongo Semarang]. <http://eprints.walisongo.ac.id/9189/>
- Sari, A., Sari, S., & Risdiyanto, B. (2018). ANALISIS SEMIOTIKA SOSIAL PEMBERITAAN KASUS KORUPSI E-KTP DI SITUS LIPUTAN6.COM. *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 4(1). <https://doi.org/10.37676/professional.v4i1.452>
- Sudibyo, A. (2001). *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKiS.